



Apa itu 'Bali Tolak Reklamasi'?

Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi atau lebih dikenal dengan istilah ForBALI adalah gerakan masyarakat sipil Bali yang menolak dengan keras rencana dari investor untuk membangun sebuah pulau baru dengan cara dirug di kawasan Teluk Benoa, Bali Selatan seluas 838 Hektar. Di pulau buatan ini rencananya akan dibangun fasilitas hiburan sekelas Disneyland, Art Center, lapangan golf, Mall megah dan hotel-hotel mewah berbintang.

ForBALI lahir dari inisiatif kaum muda Bali yang beranekaragam baik suku, agama, golongan dan profesi. Semangat yang menjadi dasar ForBALI adalah : Kepedulian dan rasa sayang akan Bali !

ForBALI adalah forum non partisan dan independen, tidak ada niat menurunkan Gubernur, maupun bertindak anarkis, kami masyarakat sipil yang cinta damai namun sekali lagi, Peduli dan sayang Bali. ForBALI tidak anti pembangunan dan tidak anti pariwisata. Kami sangat mendukung pembangunan pariwisata di Bali selama proses pembangunan tersebut tidak menghancurkan masa depan alam, lingkungan dan adat-istiadat di Bali, bersih dari korupsi dan aksi kongkalingkong penguasa dan pengusaha, serta taat pada hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas.

Kenapa 'Tolak Reklamasi' isu yang sangat penting bagi masyarakat Bali?

Rencana investor untuk melakukan reklamasi, revitalisasi, urug laut atau apapun istilahnya di Teluk Benoa seluas 838 hektar hanya akan menguntungkan segelintir pihak yaitu Pengusaha dan kroni-kroninya. Bali sudah kekurangan air bersih. Bayangkan setiap hari, air yang keluar terus mengecil dan PDAM mulai kesulitan memasok kebutuhan air ke masyarakat luas. Bila reklamasi jadi dilaksanakan maka pulau baru itu akan mengambil jatah air bersih kita. Dimana mereka akan membuang sampah? Tempat pembuangan sampah di Denpasar sudah terlalu penuh, bau busuk terus tercium hari ke hari makin luas wilayahnya. Ini hanya contoh kecil bila kita membiarkan reklamasi terjadi.

Belum lagi ancaman banjir di daerah Bali Selatan akibat luberan air saat laut pasang. Rumah-rumah di pesisir Bali selatan akan menjadi langganan banjir rob setiap harinya. Orang-orang yang menggantungkan hidup dari laut akan kehilangan pekerjaannya karena arus air berubah. Maka gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa menjadi penting untuk menyelamatkan rakyat Bali dan wilayah pesisir Bali dari kehancuran yang lebih besar akibat kerakusan pengusaha dan penguasa. Mendingkan atau meloloskan rencana Bapak Gubernur dan Investor mereklamasi Teluk Benoa berarti sama saja dengan membiarkan masa depan Bali hancur. Apakah dosa itu yang akan Anda wariskan pada anak cucu ???!

Saya Peduli! Apa yang dapat saya lakukan???

1 • Dukung petisi tolak reklamasi Teluk Benoa di:

<http://www.change.org/id/petisi/tolak-reklamasi-teluk-benoa#>

2 • Nyatakan sikapmu dengan jelas dan tegas di media sosial (FB, Twitter, dll) atau buat dan pasang Baliho Tolak Reklamasi Teluk Benoa di sekitar wilayah tempat tinggalmu.

3 • Berpartisipasi di setiap acara atau kegiatan yang Menolak Reklamasi Teluk Benoa

4 • Donasi dengan membeli kaos Bali Tolak Reklamasi atau merchandise lain dari ForBALI

5 • Ikuti dan kritisi terus perkembangan berita mengenai Reklamasi/Revitalisasi Teluk Benoa. Jangan pernah menyerah, terus konsisten melawan penghisapan (eksploitasi) dan penghancuran alam lingkungan di Bali gara-gara ulah segelintir Penguasa, Pengusaha Rakus dan kroni-kroninya!



Melawan Lupa dengan Menolak Reklamasi

Oleh Jerinx

Bali.

Nama yang begitu pendek untuk sebuah pulau yang punya begitu panjang runutan masalah. Sejak tumbangannya Soekarno dan masuknya penanaman modal asing (PMA, pulau Bali sudah didesain menjadi sapi perah pusat. Saat Bali masih memiliki basis kuat di pertanian sekitar 1965, secara umum petani di Bali lebih condong berkiblat pada PKI yang getol memperjuangkan Undang-Undang Reforma Agraria. Setelah ditumpasnya PKI dan masuknya PMA, makin matilah pertanian di Bali.

Arah pembangunan kemudian dibelokkan ke industri pariwisata. Para petani tidak lagi berani mengungkap UU Reforma Agraria karena takut dituduh PKI. Para intelektual progresif Bali yang berpotensi menggagalkan agenda pusat dengan mudah dicap 'komunis'. Lalu atas restu dan dukungan penguasa, mereka beramai-ramai dihabisi. Jenazah-jenazah mereka dikuburkan secara massal di beberapa tempat yang di atasnya kini berdiri sombong hotel-hotel mewah berbintang. Ya. Secara literal, industri pariwisata di Bali memang dibangun di atas darah orang tak berdosa.

Nama Bali selalu laku 'dijual' khususnya di Bali Selatan (Nusa Dua, Jimbaran, Kuta, Seminyak, Canggu). Sedikit-sedikit bikin konferensi di Bali. Alasannya selalu "memperkenalkan Bali di mata dunia". OK. Di awal era industri turisme dan Bali belum begitu terkenal seperti saat ini, jargon tersebut mungkin masih relevan. Tapi kini, atau setidaknya 10 tahun terakhir, ketika popularitas Bali sudah melebihi popularitas Indonesia, jargon tersebut masihkah relevan?

Miss World digelar di Bali, para kontestan diuji 'kecerdasannya' tapi tak satu pun dari mereka sadar jika pulau yang mereka singgahi ini alam dan budayanya sedang dilacurkan penguasanya. Perhelatan akbar bertaraf internasional digelar, mengundang ratusan CEO dan Presiden dari seluruh dunia ke Bali. Apa yang Bali dapat? Cuma satu: Macet!

Makin berbondong-bondonglah investor menanamkan modal di Bali. Tak ketinggalan para koruptor pun ikut-ikutan. Lucunya para sosialita dan selebriti pun dengan bangga posting foto-foto mereka di hotel milik tersangka koruptor tersebut. Peduli setan akan ketimpangan pembangunan di Bali. Peduli setan akan makin terpinggirkannya masyarakat lokal di tanah sendiri.



Bali hanyalah angka-angka di mata para penguasa dan pemodal rakus, dan kami penduduk lokal, adalah penonton yang baik.

Tanpa dibekali pendidikan yang memadai, kami dipaksa bersaing dengan tenaga kerja asing/luar Bali yang lebih terlatih. Akhirnya, diiming-imingi pekerjaan sebagai sekuriti, pelayan dan tukang kebun saja kami sudah senang. Relakan jabatan lebih terhormat menjadi milik tenaga kerja asing atau luar Bali. Kami, lokal, puas menjadi penonton saja.

Tapi cukup adalah cukup. Ketika ketidakadilan semakin merajalela, perlawanan pun perlahan tumbuh. Sedikit demi sedikit semangat perlawanan itu mengeras dan akhirnya menemukan 'lawan'-nya, yaitu mega-proyek Reklamasi Teluk Benoa. Proyek seluas 838 hektar ini merupakan proyek milik investor besar Jakarta yang didukung beberapa penguasa pusat maupun daerah.

Kami yang gelisah akan penjajahan berkedok pembangunan dan pariwisata ini membentuk sebuah gerakan kolektif bernama FORBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) yang terdiri dari aktivis, seniman, musisi, blogger, penulis, mahasiswa, pengacara, guru yoga hingga pegiat pariwisata. Di mata kami, orang-orang yang percaya akan sebuah



perjuangan untuk keadilan, proyek reklamasi ini tak sekadar proyek, tapi merupakan simbol 'penjajahan dan pembodohan' yang harus dihentikan.

Kami tidak anti dengan pembangunan. Tapi ketika pembangunan tersebut hanya didasari hitung-hitungan bisnis semata tanpa memihak pada keseimbangan ekologi dan kepentingan jangka panjang, hal tersebut tidak boleh dibiarkan. Ini rumah kami. Masa depan rumah kami, kami yang tentukan.

Perlawanan pun kami kobarkan. Kami aktif menggelar beberapa demonstrasi, konser dan diskusi publik bertemakan Bali Tolak Reklamasi. Kami juga membuat merchandise, menciptakan lagu mars serta video klip Bali Tolak Reklamasi. Perlawanan kami berbuah manis. Movement kami mendapat banyak simpati dan dukungan, terutama dari kaum muda. Bukan hanya di Bali tapi juga dari luar Bali hingga luar negeri. Seniman-seniman berkualitas seperti bang Iwan Fals, Sawung Jabo, Glenn Fredly, Seringai, Happy Salma, Kirana Larasati, Djenar Maesa Ayu dan lain-lain ikhlas memberi dukungan tanpa diiming-imingi bayaran atau hal-hal semacam itu. Bahkan anak-anak kecil di gang-gang perumahan sempit di Bali sering kami temui menyanyikan mars Bali Tolak Reklamasi. Benar-benar perjuangan yang menyentuh grass-roots.

Semangat perlawanan kami makin menjadi-jadi, apalagi feasibility study (FS) atau studi kelayakan yang dilakukan oleh para ilmuwan Universitas Udayana Bali jelas-jelas menyatakan proyek reklamasi tersebut tidak layak. Setelah FS keluar, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika yang sedari awal sudah terbukti mencoba segala cara untuk memuluskan proyek ini pun terpaksa menyatakan reklamasi tidak akan

dilakukan. Namun anehnya, hingga detik ini ia bersikukuh tidak mau mencabut SK Reklamasi yang ia terbitkan.

Jika penguasa mencoba memenangkan perang ini dengan bermain di ranah manipulasi media, intimidasi dan kekerasan, maka kami melawan dengan cara lebih tampan. Dengan dana pribadi, kami FORBALI terbang ke Jakarta dan menyusun agenda demonstrasi di depan Istana Presiden.



Kami juga mengadakan diskusi serta panggung musik bertema Selamatkan Pesisir Indonesia di kampus Moestopo. Kedua acara berjalan sangat sukses dan dihadiri ratusan orang. Dari atas mobil pick-up, saya bersama kawan-kawan musisi Bali (Navicula, The Hydrant, The Bullhead) sempat menyanyikan mars Bali Tolak Reklamasi di depan Istana Presiden.

Perlawanan serupa terjadi di tingkat warga. Beberapa desa di Bali Selatan mulai berani terang-terangan menyatakan penolakannya. Mereka memasang spanduk-spanduk penolakan dan turun ke jalan berdemo di depan kanor Gubernur Bali. Tapi, penguasa menyikapinya dengan "jenius", menangkap beberapa warga desa yang terlibat demo menolak reklamasi dengan tuduhan telah mengancam

keselamatan Gubernur. Gila. Sudah dilindungi polisi, ormas kekar, dukun sakti dan lain-lain kok Gubernur masih merasa terancam ya?

Penangkapan empat warga Desa Sidakarya juga tidak berhasil menyurutkan gerakan Bali Tolak Reklamasi. Berbagai konser solidaritas untuk keempat warga yang ditangkap pun diadakan. SID, Nosstress, Nymphaea dan beberapa band lain turut mendukung panggung-panggung solidaritas tersebut. Desa Sidakarya bahkan makin kompak dan solid dengan penolakannya.

Meski banyak anak muda mendukung gerakan kami, dan gerakan ini perlahan membesar, tapi tak sedikit juga muncul suara-suara sumbang yang menuduh kami, khususnya musisi, hanya memakai isu Bali Tolak Reklamasi sebagai kendaraan untuk meraih popularitas. Masih banyak anak muda yang awam akan arti sebuah perjuangan yang tulus. Tak bisa kami salahkan juga. Kami maklum, sejak kecil sudah dicekoki media mainstream yang mengajarkan bahwa musisi baik itu adalah musisi yang tak boleh memiliki opini apapun selain opini musik dan opini tentang sosialita tolol yang hendak mereka tiduri. Maka, para musisi yang menolak tunduk terhadap penjajahan dan pembodohan, terlihat aneh di mata mereka para pelahap musik dan media mainstream.

Namun suara-suara sumbang tersebut tak berhasil memadamkan api kami untuk terus melawan. Apa gunanya kami bernyanyi tentang perubahan dan perlawanan jika itu hanya sebatas di mulut? Inilah pertanggungjawaban moral kami terhadap lirik-lirik yang kami tulis. Dan kami tidak takut!

**Kalian dengar itu,
KAMI TIDAK TAKUT !!!**

Membongkar Permainan Hukum demi Memuluskan Reklamasi

Oleh Wayan “Gendo” Suardana

Kebijakan pembangunan dan investasi harus seiring sejalan dengan kebijakan tata ruang. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih aturan bahkan saling labrak dalam penerapannya.

Setiap kebijakan pembangunan harus memerhatikan pemanfaatan ruang agar tidak terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan ruang. Saat ini, kebijakan pemanfaatan ruang di Indonesia lebih banyak diakomodasi melalui berbagai proyek yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat memang mutlak dibutuhkan namun para pemangku kebijakan dan investor haruslah taat pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan MP3EI pada dasarnya dibagi menjadi enam koridor. Bali termasuk dalam koridor V bersama Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang memiliki fokus peningkatan investasi di bidang Pariwisata, Perikanan dan Peternakan. Fokus MP3EI di Bali adalah pada pertumbuhan pariwisata sehingga setiap investasi diarahkan untuk terus memompa denyut nadi pariwisata. Salah satu kawasan perhatian utama investasi sektor pariwisata di Bali adalah Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Benoa.

Dokumen MP3EI khususnya dalam laporan perkembangan pelaksanaan MP3EI koridor V, menempatkan KPI Benoa dengan fokus investasi pada rencana reklamasi Teluk Benoa.

Melalui penetapan KPI Benoa dengan fokus reklamasi Teluk Benoa, sedari awal sudah ada upaya

sistemik di tingkat nasional untuk memuluskan PT. Tirta Wahana Bali International (TWBI) mereklamasi di Teluk Benoa. Ada arahan yang secara spesifik di dalam dokumen MP3EI untuk mewujudkan reklamasi tersebut.

Arahan untuk mewujudkan reklamasi di kawasan Teluk Benoa hasil rekomendasi dari MP3EI adalah:

1. Percepatan penerbitan Perda RTRW Kabupaten Badung untuk mengakomodasi investasi PT. Tirta Wahana Bali Internasional;

2. Percepatan penetapan rencana zonasi Kawasan Teluk Benoa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Percepatan penerbitan izin pelaksanaan reklamasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Jika melihat arahan pertama, percepatan penerbitan Perda RTRW Kabupaten Badung untuk mengakomodasi investasi PT. TWBI maka terlihat jelas bahwa ada arahan atau dorongan dari MP3EI agar terjadi perubahan Perda RTRW. Bisa termasuk di dalamnya mengakomodir kepentingan PT. TWBI untuk mereklamasi Teluk Benoa. Artinya akan ada upaya pembentukan peraturan-peraturan sesuai kehendak investor. Arahan-arahan ini merupakan upaya sistemik untuk memuluskan reklamasi Teluk Benoa baik di tingkat lokal maupun nasional. Upaya lainnya adalah dengan melakukan penyusunan peraturan daerah termasuk RDTR Teluk Benoa (Kab. Badung) dan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP – 3K) untuk mendukung investasi dunia usaha di perairan Teluk.



Artinya, kebijakan MP3EI khususnya penetapan KPI Benoa dalam MP3EI termasuk rencana reklamasi Teluk Benoa oleh PT. TWBI tidak ditetapkan sesuai prosedur. Segenap peraturan yang diterbitkan penuh dengan kepentingan dan pesanan untuk memuluskan reklamasi Teluk Benoa.

Mari melihat poin kedua. Untuk melakukan Percepatan Penetapan Rencana Zonasi Kawasan Teluk Benoa, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertanggal 3 Juli 2013. Pasal 3 ayat (3) menyatakan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku pada zona inti. Pembagian zona dalam kawasan konservasi juga telah diatur rapi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013.

Permen tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini membagi kawasan konservasi perairan menjadi beberapa zona yakni zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya (Pasal 26 ayat (2)). Artinya kegiatan reklamasi hanya dilarang dilakukan di zona inti dari kawasan konservasi bukan lagi di seluruh kawasan konservasi.

Namun sesungguhnya kebijakan untuk mereklamasi Teluk Benoa adalah kebijakan cacat secara prosedural dan diduga kuat melanggar peraturan perundang-undangan setidaknya dapat dilihat dari penetapan kawasan untuk rencana reklamasi.

Bali sendiri telah memiliki Perda Tata Ruang yakni Perda RTRWP No. 16 Tahun 2009. Namun khusus untuk kawasan perkotaan Denpasar, Gianyar, Badung, Tabanan (Sarbagita) yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional memiliki peraturan tata ruang sendiri yakni Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita. Perpres ini berlaku mutlak di kawasan Sarbagita mengingat berdasarkan ketentuan peralihan di dalam Perpres Sarbagita ini segala pengaturan tata ruang yang bertentangan dengan Perpres Sarbagita dinyatakan tidak berlaku. Pengaturan dan peraturan tata ruang di kawasan perkotaan Sarbagita tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perpres ini sedangkan yang bertentangan harus kembali mengacu pada Perpres Sarbagita.

Kawasan perairan Teluk Benoa terletak sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung adalah salah satu kawasan yang diatur di dalam Perpres Sarbagita.

Oleh Perpres Sarbagita, Perairan kawasan Teluk Benoa dinyatakan sebagai kawasan konservasi perairan yang diterangkan dengan jelas pada pasal-pasal yang berkaitan dengan Teluk Benoa di antaranya :

Pasal 55 ayat (5) menyatakan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

b. Kawasan konservasi perairan di

perairan kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Perairan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Perairan Kawasan Teluk Benoa sebagian di Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan kawasan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Jika pengaturan Tata Ruang telah menjelaskan bahwa kawasan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi perairan selanjutnya Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terbit tanggal 5 Desember 2012 jauh lahir belakangan dari Perpres MP3EI. Ketentuan yang wajib diperhatikan di dalam Perpres tersebut adalah ketentuan pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.



Selanjutnya pada arahan kedua dan ketiga, harus dilihat cermat bahwa arahan ini terbit sebelum adanya regulasi yang mengatur tentang Reklamasi turunan dari UU 27 pasal 34 dan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terbit 5 Desember 2012 jauh lahir belakangan dari Perpres MP3EI. Ketentuan yang wajib diperhatikan di dalam Perpres tersebut adalah ketentuan pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.

Lahirnya berbagai peraturan dan kebijakan termasuk Perpres MP3EI justru berusaha untuk memecah

status kawasan perairan Teluk Benoa. Teluk Benoa justru tidak diperhatikan dan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai kawasan konservasi. Parahnya lagi, oleh Perpres MP3EI kawasan Teluk Benoa justru akan dijadikan sebagai kawasan perhatian investasi dengan fokus aktivitasnya adalah rencana reklamasi. Sebuah inisiatif investasi yang jelas bertentangan dengan peraturan tata ruang. Selain penetapan rencana reklamasi hal tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa posisi kawasan Teluk Benoa di mata MP3EI berbanding terbalik dengan posisi kawasan Teluk Benoa di mata Perpres Tata Ruang Sarbagita.

Melihat posisi kawasan perairan Teluk Benoa yang dalam MP3EI disebut sebagai KPI Benoa, berdasarkan dua produk peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan perairan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi yang tidak boleh dilakukan reklamasi.

Artinya penetapan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Benoa dalam MP3EI yang bertujuan untuk mendorong rencana investasi berupa pembangunan pusat pariwisata baru dengan melakukan reklamasi Teluk Benoa justru bertentangan dengan peraturan tata ruang dalam hal ini Perpres Sarbagita serta bertentangan dengan Perpres Reklamasi.

Melihat kembali dengan cermat di dalam dokumen MP3EI khususnya dalam laporan perkembangan pelaksanaan MP3EI koridor V bahwa yang menjadi fokus investasi di KPI Benoa adalah rencana reklamasi Teluk Benoa. Lalu tepatkah jika kawasan konservasi perairan Teluk Benoa sebagaimana diatur dalam Perpres Sarbagita dilakukan reklamasi? Bukankan prinsip konservasi bertentangan dengan reklamasi.

Gerakan ini harus terus dan tambah kuat... oleh Iwan Fals

Wah...Api itu masih ada. Masih banyak anak muda yang begitu militan, nggak vandal, nggak merusak tapi peduli, begitu menguasai persoalan, dan mau bergerak untuk alam, untuk sesuatu untuk kehidupan orang banyak. Ini perlu diapresiasi. Saya melihat, sebagai orang yang berusia 53 tahun, ini hebat. Hormat sekali. Kalian melakukan gerakan ini, sama dengan menolong hidup saya. Terima kasih. Mudah-mudahan gerakan ini terus dan tambah kuat. Tolak Reklamasi!

Sumber:<http://www.youtube.com/watch?v=7mXtC01nG94>

Reklamasi Teluk Benoa akan merusak hukum alam... oleh Ida Pedanda Sebali Tianyar (Tokoh Pemuka agama Hindu)

Walaupun sampai jungklang-jungklung Pedanda dan semua orang berdoa untuk keselamatan alam, tidak akan terjadi apa-apa jika hanya berdoa saja. Melestarikan alam memerlukan tindakan. Menurut Pedanda, reklamasi Teluk Benoa akan merusak hukum alam. Dan hukum alam adalah kehancuran bagi yang tinggal di dalamnya.

(Dari acara bincang-bincang Dampak Reklamasi Teluk Benoa, Penggak Men Mersi Kesiman, 22 Maret 2014)

Bali bisa banjir setiap tahun... oleh Dr. Ketut Sarjana Putra, Vice President Conservation International Indonesia

Teluk benoa merupakan penampung beberapa aliran sungai dari daratan di Bali. Ketika diubah dengan reklamasi sebesar 838 hektar, jika hujan minimal selama 4 jam, maka debit air yg mengalir ke lautan akan lebih besar, (tidak tertampung lagi, karena sudah terhalang oleh pulau reklamasi) dan permukaan air akan naik kurang lebih 4 meter dan menenggelamkan daerah pesisir bali. Dan bali memiliki siklus hujan yg terjadi lebih dari 10 jam dalam sehari. Jika hujan selama 4 jam saja sudah naik sebesar 4 meter. Bagaimana jika hujan 10 jam? Bukan hanya pesisir yg akan tenggelam. Air itu akan tumpah dan menysar daerah yang lebih rendah. Air akan mengalir ke tempat lebih rendah itu sudah pasti dan yang akan menjadi korban atau berpotensi banjir adalah daerah sekitar teluk dengan ketinggian 0-2 meter seperti Sidakarya, Suwung, Tanjung Benoa dan yang lainnya. Bila sudah banjir tiap tahun, apakah turis masih mau datang ke Bali?

(Dari acara bincang-bincang Dampak Reklamasi Teluk Benoa, Penggak Men Mersi Kesiman, 22 Maret 2014)

Rencana Reklamasi Teluk Benoa harus ditolak!... oleh Anak Agung Ngurah Kusuma Wardana (Penglingsir Puri Kesiman, Denpasar)

Kalau seandainya proyek reklamasi Teluk Benoa terwujud, bukan hanya rakyat yang kalah namun Tuhan pun juga kalah.....Lihat Serangan (reklamasi Serangan), sampai saat ini tidak berdampak positif. Rencana proyek Reklamasi Teluk Benoa harus ditolak.....Kita tidak punya tanah air lagi, Tanah kian mahal dan Laut mau diurug...

Dikutip dari Pidato pada acara Diskusi ForBALI di Penggak Men Mersi.

Reklamasi bisa merusak lingkungan ... oleh Loggena Ginting Country Director Greenpeace Indonesia

Ada banyak pilihan pembangunan yang bisa dilakukan tanpa merugikan lingkungan dan masyarakat lokal. Biaya sosial dan lingkungan proyek Reklamasi pantai sangatlah tinggi, dan biasanya masyarakatlah yang akan menanggung biaya tersebut. Bersama sama kita bisa menlok reklamasi ini!





Mars

BALI TOLAK REKLAMASI

**BANGUN BALI SUBSIDI PETANI
KITA SEMUA MAKAN NASI
BUKANNYA BUTUH REKLAMASI**

**KEPUTUSAN BAU KONSPIRASI
PENGUSAHA PENGUSAHA BAGI KOMISI
KONSERVASI DIKHIANATI**

Reff:

**BANGUN BALI TOLAK REKLAMASI
SAYANG BALI TOLAK REKLAMASI
BANGUN BALI TOLAK DIBOHONGI
RUSAK BUMI DAN ANAK NEGERI**



JANGAN UBAH PERPRES 45/2011 • Mempetisi Presiden @SBYudhoyono

Bapak Presiden,

Rakyat Bali Selatan dan wilayah pesisir Teluk Bena resah dan tegang. Sebab Teluk seluas 838 hektar ini mau diurug atau direklamasi oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI)

Pasti Bapak tahu, reklamasi atas Teluk ini melanggar Perpres "Konservasi" Sarbagita, yaitu Perpres No 45/2011 yang dibuat oleh Bapak sendiri. Isinya menyatakan Teluk Bena Bali adalah kawasan konservasi perairan. Karena itu ia tidak boleh direklamasi. Lihatlah kembali oleh Bapak bunyi Pasal 55 ayat (5).

Kami seniman musik, Pak Presiden. Bukan ahli hukum. Tapi tidaklah sulit bagi kami untuk mengerti isi Perpres itu. Sebagai warga negara malah kami diwajibkan mengerti.

Bagi kami yang lahir, tumbuh besar dan hidup di Bali, mereklamasi (mengurug) perairan teluk demi keuntungan bisnis dari daratan buatan adalah ancaman!

Sekarang saja mulai terjadi krisis air di Bali Selatan akibat pembangunan masif pariwisata. Air bersih di sana terkuras oleh mesin-mesin penyedot air yang mengisi kolam renang hotel-hotel mewah, villa-villa privat megah, dan lapangan golf.

Bapak Presiden, acapkali, bak mandi di rumah warga kering. sumber air bersih semakin diarahkan ke pipa-

pipa area lapangan golf, pusat perbelanjaan, areal hiburan wisata kelas Disneyland, gedung sekelas Sydney Theatre, art center, dan hotel-hotel mewah, villa-villa, apartemen dan jenis akomodasi lainnya yang akan berdiri di atas pulau buatan tersebut.

Bapak Presiden, masa jabatan Bapak segera berakhir. Karena itu kami ingin agar Bapak mewariskan kebijakan bagi generasi ke depan, yaitu dengan tidak melakukan upaya-upaya revisi status konservasi ke non konservasi atas Teluk ini. Kami dengar Bapak meminta Dosen Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra untuk mencari celah revisi. Semoga kami salah dengar.

Akhirnya, kami ingin mengajak siapa saja yang sangat mencintai keindahan dan kekayaan alam Bali dan Indonesia, termasuk Pak @SBYudhoyono, untuk lebih memahami perpres silahkan klik di sini: <http://www.forbali.org/wp-content/uploads/2013/09/Peraturan-Presiden-tahun-2011-045-11.pdf>

Salam Bali Tolak Reklamasi Teluk Bena,

Superman Is Dead • Navicula • Nosstress

Tunjukkan kepedulian-mu dengan ikuti Superman Is Dead, Navicula & Nosstress menandatangani petisi ini di: <http://www.change.org/id/petisi/tolak-reklamasi-teluk-bena#>

